

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahman Pribadi dan Abu Rayyan, 2009 *Membongkar Jaringan Teroris*. Jakarta: Abdika press.
- Adami Chazawi, 2002 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Budi Setyawan, 2020 “*IPAC: Ada 94 Residivis Kasus Terorisme*” Jakarta.
- Balitbang, 2016, *Hukum dan HAM, Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi*, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, “*Pidana dan Pemidanaan*”, Jakarta: Sinar Grafika.
- Darwan 1989, Prints, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Djambatan Bekerja Sama Dengan LBH Jakarta, Jakarta.
- David J. Cooke, Pamela J. Baldwin, Jaqueline Howison, 2008, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, terjemahan In Prisons, diterjemahkan oleh Hary Tunggal, Jakarta: Gramedia.
- Dwijia Priyatno, 2006 *Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2019, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*, Lhokseumawe.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Golose, P. R, 2009, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach, dan Menyentih Akar Rumput*. yayasan pengembangan ilmu kajian kepolisian.
- Harvey W. Kushner, 2018, *Encyclopedia of Terrorism tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, London : Sage Publication, Bandung.
- Hendropriyono. A.M, 2009, *Terorisme: Fundamental Kristen, Yahudi dan Islam*, Jakarta: Buku Kompas.
- Hikam, M. A. 2016, *Peran masyarakat sipil indonesia membendung DERADIKALISASI*. penerbit buku Kompas.

- Ilyasin, Muhammad, Abzar, Kamaluddin, 2017, *Teroris dan agama, konstruksi teknologi dan teoantroposentris*. Jakarta: fajar Interpratama.
- Lamintang. P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.
- Lamintang. P.A.F. dan C.D. Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Lily Rasijidi, *Dasar Dasar Filsafat Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 1990.
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahrus, H. 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana (Cetakan Pe)*. Rajawali Pers.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 1987 “*Panduan Pemasyrakatan UUD RI 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*”.
- Muh. Khamdan, 2015, “*Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*” UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, *Pembaharuan pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasyrakatan Narapidana*, Jakarta: Indhill Co.
- Petrus Irwan Panjaitan & Pandapotan Simorangkir, 1995 “*Lembaga Pemasyrakatan Dalam Persfektif Sistem Peradilan Pidana*”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- R. Achmad Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyrakatan di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Rhona K.M. Smith, dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM-UII.
- Rodliyah dan Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanski Pidananya*, Rajawali Pers, Depok.
- Rony Hanitiji Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sukawarsini. 2010, *Terorisme tinjauan psiko-politis, peran media, kemiskinan dan keamanan sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sumaryono. E, 2002, *Etika dan Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok.
- Tim Penerjemah BPHN, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Tim, R. A. 2012, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme* (Undang- Undang Nomor 15 tahun 2003).
- Widodo, 2017, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi dan keadilan restoratif, terorisme, cybercrime, pidana mati, dan peradilan sesat*. ASWAJA PRESSINDO, 2017.
- Yuliyanto, 2020, *Evaluasi Deteksi Dini Terhadap Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 1st ed*, Jakarta: Balitbangkumham Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018.

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana, dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme., Berita Negara Republik Indonesia (2021).

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

C. Jurnal, Skripsi

Ahmad Afwan Hofar, *Analisis Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan Di Polresta Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Syari"ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.*

Aswir, *Analisis Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) Kuh-Pidana (Studi Kasus di Polsek Biringkanaya), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.*

Asnidar Aziz, *"Implementasi syarat tambahan untuk memperoleh pembebasan bersyarat dalam tindak pidana luar biasa korupsi, narkoba dan terorisme pada lembaga pemsarakatan kelas I makassar", Skripsi Universitas Bhayangkara, 2023.*

Bambang Waluyo. *"Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", Jurnal Yuridis, Vol. 1 No. 2, Desember 2014.*

Berlian Simarmata, *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris, yogyakarta, Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011.*

Chandra Alberto, *"Tinjauan yuridis terhadap peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap kejahatan luar biasa korupsi, narkoba, dan terorisme", Skripsi Universitas Pandjajaran, 2020.*

Deni Ambrarwati, *"Tinjauan yuridis pembebasan bersyarat bagi narapidana dilembaga pemsarakatan", Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2022.*

Erlina Purnama Sari, *Proses Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, Depok : Skripsi UI*, 2009.

Ibrahim, *Penanggungan Penahanan Dalam Proses Perkara Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu)*, *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Negeri Palu*, 2014.

Insan Firdaus, "Penempatan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2021.

Kurnia Sarah, "Pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme" *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.

Muhammad Ar Rafii Arbi, 2021 "Analisis ketepatan pemberian remisi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme", *Skripsi Universitas Islam Sumatera Utara*, 2021.

Tenny Oki Librawan, *Kedudukan Hukum Terhadap Penanggungan Penahanan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam, Kalimantan*, 2022.

D. Internet

Ruangngobrol.Id,last.modified.2020,accessed,June 18,2021,<https://ruangngobrol.id/2020/10/08/ulasan/ipac-ada-94-residivis-kasus-terorisme-sejak-2002hingga-mei-2020/>

<https://ilmu/hukum/paralegal.id/2019/12/02/pengertian/narapidana/kasus-tindak-pidana-terorisme.>

<https://medanews.com/2021/09/12/lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasyarakatan/>

https://1drv.ms/w/s!Ap43HOZPW02zsCH9kCSQ0Hi_yfAA/hukum-peraturan-pemerintah/kemenkumham.

E. Wawancara

Sabda Permana, Pegawai dibagian BHPT, Hasil Wawancara Pada Tanggal 22 April 2023, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan.

Dicky, Pegawai dibagian BHPT, Hasil Wawancara Pada Tanggal 25 April 2023, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan.

Mytrando Indratuju, KA.SUBSI dibagian Register, Hasil Wawancara Pada Tanggal 25 April 2023, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan.

Chindy, Pegawai dibagian Register, Hasil Wawancara Pada Tanggal 15 April 2023, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan.

Putra Hakim Tamba, Pegawai dibagian Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Hasil Wawancara Pada Tanggal 27 April 2023, di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

Nurul, Pegawai dibagian Registrasi Kementerian Hukum dan HAM, Hasil Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2023, di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

Aris Saputra, Narapidana Terorisme yang sedang menjalani masa pidananya, Hasil Wawancara Pada Tanggal 25 April 2023, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan.

Dedi Suhendra, Narapidana Terorisme yang sedang menjalani masa pidananya, Hasil Wawancara Pada Tanggal 25 April 2023, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan.